

**KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PENGIRIMAN PASUKAN PERDAMAIAN
PADA MISI MARITIME TASK FORCE (MTF) UNITED NATIONS INTERIM
FORCE IN LEBANON (UNIFIL)**

Oleh: Salsa Desliana Alya Putri

email: salsadesliana@gmail.com

Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP., M.Si

Bibliography: 7 Buku, 1 Jurnal, 14 Situs Web, 2 Dokumen Resmi,
3 Wawancara

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau 28293
Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

The conflict that occurred in Lebanon in 2006 caused civilian and military casualties as well as the destruction of civilian infrastructure and massive displacement due to Israeli attacks on countries in the Middle East. The United Nations formed a peacekeeping operation, namely the United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) with the aim of maintaining peace in Lebanon.

This study uses qualitative methods with data collection methods in the form of documentary studies. Documentary studies are conducted by collecting and analyzing written documents or pictures from interviews. This study uses the Neorealist Perspective and the theory of Naval Diplomacy. This theory explains naval diplomacy in Maritime Task Force missions..

Indonesia has a global vision as stated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution, namely "to participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice". This made Indonesia's initiative to send peacekeeping troops to Lebanon in the current situation. Indonesia's contribution in sending peacekeepers to Lebanon since 2006 and began sending the Navy on Maritime Task Force (MTF) missions in 2009. This mission aims to support the Lebanese Navy in monitoring Lebanese territorial waters, illegal activities such as weapons smuggling and trade in goods Prohibited goods pass through the Lebanese sea. There are 5 countries that have contributed to the MTF mission, namely Indonesia, Germany, Turkey, Greece and Bangladesh. This mission also carried out joint exercises between the Lebanese Navy so that the Lebanese army could defend its country's territory independently.

Keywords: *Peacekeepers, Naval Diplomacy, Maritime Task Force, United Nations Interim Force In Lebanon.*

PENDAHULUAN

Banyaknya konflik yang terjadi di dunia membutuhkan suatu badan yang dapat mencegah bahkan mengakhiri konflik. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), sebagai badan utama, memikul tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Badan ini memenuhi tugasnya untuk menyelidiki perselisihan atau situasi yang mengarah ke konflik internasional, membuat rekomendasi untuk penyelesaian konflik, menjatuhkan sanksi dan bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk menjaga dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.¹ Upaya yang dilakukan dalam membantu pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian, DK PBB membuat operasi pemeliharaan perdamaian PBB yaitu United Nations Peacekeeping Operations (UN PKO). Berikut pasal 43 Piagam PBB menyatakan bahwa:

*“Semua anggota PBB, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus”.*²

PBB membentuk operasi pemeliharaan perdamaian yaitu United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Maret 1978, operasi ini dibentuk dengan tujuan menjaga perdamaian di Lebanon. Saat terjadinya konflik Israel-Hizbullah tahun 2006,

Indonesia aktif berdiplomasi di PBB dan negara-negara OKI (Organisasi Kerja sama Islam) serta aktif berkomunikasi ke Lebanon dan Israel melalui pihak ketiga untuk meyakinkan bahwa Indonesia sangat siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon dalam situasi itu.³

Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, para pendiri bangsa Indonesia telah memiliki ambisi yang kuat bahwa sebagai suatu negara Indonesia harus turut aktif berkontribusi dalam pembentukan tata dunia yang damai dan berkeadilan sosial. Pendirian negara Indonesia memiliki visi global yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu “untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴

Ini merupakan peluang besar dan inisiatif Indonesia untuk menjaga komitmen menjaga perdamaian di Timur Tengah dengan menyerukan gencatan senjata demi kepentingan stabilitas keamanan internasional. Indonesia menunjukkan kepedulian terhadap keamanan dunia internasional dan kesediaan untuk berkontribusi dalam pembentukan perdamaian bilateral dan pembukaan UUD 1945, menjaga komitmen Indonesia terhadap setiap operasi perdamaian PBB di dunia internasional.

Peran Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian adalah melaksanakan kerja sama pertahanan untuk memajukan kepentingan nasional. Kerja sama pertahanan mencakup tugas TNI dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Bab VI Buku Putih Pertahanan (2008) menyatakan bahwa TNI memenuhi tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam operasi perdamaian

¹ United Nations Security Council, “Functions and Power.”

<http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml>

² United Nations, “Charter of the United Nations: Chapter VII,” <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>.

³ Tabloid Diplomasi, “Diplomasi Indonesia Konsisten Mengelola Perubahan”, 2012, <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Januari%202012.pdf>

⁴ Pembukaan UUD 1945.

internasional dengan maksud untuk membangun pertahanan negara.⁵

Inisiatif Indonesia mengirimkan pasukan Garuda dalam misi UNIFIL merupakan bentuk diplomasi Indonesia di dunia internasional, yaitu bentuk diplomasi pertahanan Indonesia di bawah mandat PBB yang dimulai sejak tahun 1957. Pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang merupakan bagian dari kekuatan Garuda, membuat suasana diplomasi terasa sangat kental bahkan sama pentingnya dengan misi utama yang diemban sebagai penjaga perdamaian di wilayah negara konflik berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai perwujudan perubahan paradigma baru pertahanan nasional dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁶

Indonesia telah berhasil mengirimkan pasukan Angkatan Darat ke Lebanon sejak tahun 2006 dan tahun 2009 Indonesia mulai mengirimkan pasukan Angkatan Laut dalam misi Maritime Task Force (MTF) UNIFIL di perairan Lebanon. Maritime Task Force (MTF) berada dibawah mandat PBB yang bertanggung jawab untuk mendukung Angkatan laut Lebanon dalam mengawasi perairan teritorial Lebanon, mengamankan garis pantai dan mencegah masuknya senjata ilegal atau materi yang berhubungan dengan hal tersebut lewat laut ke Lebanon. MTF dibentuk berdasarkan permintaan dari pemerintah Lebanon (PM Siniora) dan berada dalam mandat Dewan Keamanan PBB, Resolusi 1701 (2006).⁷ Kontingen

⁵ "Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 | PPID Kementerian Pertahanan Republik Indonesia", Kemhan.Go.Id, 2014, <https://www.kemhan.go.id/ppid/2014/01/20/buku-putih-pertahanan-indonesia-2008/>.

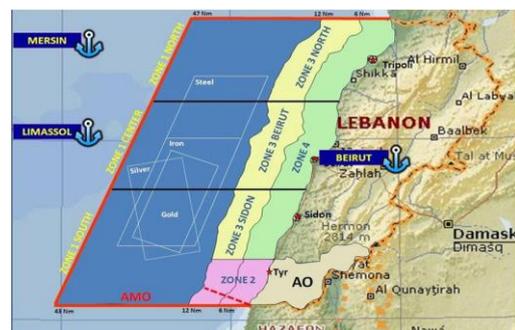
⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)

⁷ Puspem Mabes TNI PUSPEN TNI, "MARITIME TASK FORCES Â€ UNIFIL | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA", Tni.Mil.Id, 2022,

Garuda dikirimkan sebagai pasukan yang ikut serta dalam menjaga perdamaian di Lebanon.

Dalam hal pengendalian operasi MTF oleh UNIFIL Force Commander didelegasikan kepada MTF Commander dan MTF adalah Naval task force pertama yang ada dibawah misi PBB. Pembentukan MTF pasca konflik tahun 2006 adalah sebagai tanda berhentinya blokade laut Israel di Lebanon. Pada saat ini komposisi MTF terdiri dari gabungan kapal-kapal dari berbagai Negara NATO dan non NATO dan dipimpin oleh seorang Rear Admiral dari Angkatan Laut Brazil.

Gambar 1.1 Area of Maritime Operations MTF



Sumber: tni.mil.id

Adapun area operasi maritim membentang dari garis perbatasan laut dengan Suriah disebelah Utara dan garis batas wilayah laut dengan Israel disebelah Selatan (belum ada kesepakatan), memanjang sejauh 110 NM dari Utara sampai ke Selatan, dengan lebar 43 NM dari garis pantai, dengan luas 5000 NM². Fasilitas pelabuhan sebagai fasilitas logistik yang masuk dalam area operasi maritim adalah pelabuhan Beirut (Lebanon), Mersin (Turki) dan Limasol (Ciprus).⁸

Berikut mandat MTF berdasarkan resolusi DK PBB 1701 serta berdasarkan surat permintaan dari pemerintah Lebanon yang ditandatangani oleh PM Siniora

<https://tni.mil.id/view-45242-maritime-task-forces-unifil.html>.

⁸ Ibid.

tanggal 6 September 2006, maka tugas pokok dari Satgas MTF⁹ adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan Maritime Interdiction Operation (MIO) dan pengawasan dalam rangka membantu Angkatan Laut Lebanon mengawasi dan mencegah masuknya senjata ilegal melalui laut di wilayah yuridiksi Lebanon, sampai dengan Angkatan Laut Lebanon mampu untuk melaksanakannya secara mandiri.
- 2) Memberikan pelatihan agar Angkatan Laut Lebanon mampu melaksanakan tugas-tugas angkatan laut sehingga mampu menjaga wilayah perairan teritorialnya sendiri tanpa asistensi dari MTF-UNIFIL.
- 3) Tugas tambahan adalah melaksanakan pengawasan pergerakan udara di atas wilayah area operasi maritim dan di wilayah Lebanon.

Dalam misi MTF-UNIFIL, Indonesia turut serta mengirim Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) berikut awak dan pasukannya ke perairan Lebanon mulai dari tahun 2009 hingga saat ini di bawah payung hukum Keppres No.15 tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon.

KERANGKA TEORI

Perspektif Pluralisme

Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana Negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah, MNCs, kelompok ataupun individu.¹⁰

Menurut Michael Hass organisasi internasional memiliki dua pengertian yaitu sebagai sebuah lembaga atau struktur

yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan dan organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional.¹¹

Organisasi Internasional bergerak di berbagai bidang dengan keanggotaan terbuka, yang dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang meliputi keanggotaan universal. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB sebagai badan utama, memikul tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sebuah Peacekeeping Operation yang dibentuk PBB dalam upaya membantu pencegahan konflik dan penciptaan perdamaian. PBB membentuk United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dengan tujuan menjaga perdamaian di Lebanon. Indonesia berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaiannya dalam misi Maritime Task Force (MTF)-UNIFIL untuk menjaga perdamaian di Lebanon sesuai mandat PBB serta misi yang dilaksanakan murni untuk perdamaian.

Teori Perdamaian

Johan Galtung menyebutkan bahwa terdapat dua definisi tentang perdamaian. Pertama, negative peace yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kepentingan masing-masing, ketiadaan asimetri ketakutan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Ciri-ciri lainnya adalah ketiadaan penunjukkan kekuatan (show of force) dan suasana yang terjadi bukan sekedar tanpa perang, tetapi

⁹ Ibid.

¹⁰ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, (London: Allyn ann Bacon, 1999).

¹¹ Michael Hass dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969).

ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi belum terselesaikan.¹²

Kedua, *positive peace* yang ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang bersifat non-koersif untuk mencegah timbulnya konflik. Hal ini termasuk tidak adanya kondisi-kondisi yang menekan atau menyengsarakan manusia, yang meliputi kondisi terjaminnya kebutuhan lahiriah (keamanan dari kekerasan dan kelaparan) dan batiniah (keamanan dari rasa takut, jaminan untuk melakukan ibadah, serta kebebasan untuk berpikir dan berpendapat). Adanya perangkat penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, situasi ketiadaan perang, terciptanya keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, dan pembagian politik yang luas adalah langkah awal terciptanya *positive peace*.¹³

Konflik yang terjadi antara Lebanon-Israel menyebabkan kondisi yang masih berpotensi terjadinya perang dikarenakan kedua pihak berusaha mencapai kepentingan masing-masing, perbenturan kepentingan, adanya ketakutan oleh masyarakat atau menyengsarakan manusia, yang dimana situasi tersebut belum dapat dikatakan situasi damai. Maka, diperlukannya operasi pemeliharaan perdamaian agar mencegah kembalinya konflik. Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya. Pada misi Maritime Task Force (MTF) UNIFIL, Kontingen Garuda melakukan tugas untuk mengawasi perairan teritorial Lebanon.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat Deskriptif-Analitis, dengan menggunakan Metode Kualitatif. Penelitian ini menjelaskan mengenai tugas perdamaian Indonesia

¹² Johan Galtung, *Peace By Peaceful Means*, (London: SAGE Publications, 1996)

¹³ Ibid.

dalam Misi Maritime Task Force (MTF) di UNIFIL. Indonesia berkontribusi mengirimkan pasukan serta Kapal Perang RI dalam misi ini dan hingga saat ini Indonesia masih mengirimkan pasukannya.

Peneliti menggunakan data dan fakta dari peristiwa penting di masa lalu sebagai gambaran untuk membantu penelitian mengenai dari awal konflik yang terjadi di Lebanon-Israel hingga terbentuknya UNIFIL oleh PBB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lebanon secara geografis berada diantara 33^o-35^o LU dan 35^o-37^o BT, berbatasan dengan Suriah di sebelah timur dan utara, sebelah Barat menghadap ke laut tengah (*Mediterranean Sea*) dan Siprus, serta sebelah Selatan dengan Israel. Kondisi wilayah secara umum berbentuk pegunungan dengan luas wilayah 1.452 km, panjang pesisir pantainya sekitar 212 km dan terbagi atas 6 wilayah/provinsi yang sebagian besar merupakan daerah perkotaan meliputi Beirut, Mount Lebanon, North Lebanon, South Lebanon Sidon, South Lebanon Nabatieh dan Bekaa. Ibu kota Lebanon adalah Beirut yang terletak di pinggir laut.¹⁴

Lebanon sebagai negara *multi culture* dikawasan Timur Tengah, hampir sebagian besar penduduknya merupakan perpaduan keturunan Arab dan Eropa (khususnya Perancis). Data statistik jumlah penduduk tahun 2017 adalah 6.082 juta jiwa, di Beirut mayoritas warganya beragama Kristen Maronite, sedikit Muslim Sunni dengan variasi *Greek Catholics* dan Muslim Syiah yang cukup banyak di pinggiran selatan Beirut. Penduduk Beirut, selain *Funisia* (keturunan asli Lebanon) juga dipenuhi oleh keturunan Armenia. Warga Asia cukup sedikit terutama dari India, Bangladesh dan Srilanka.¹⁵

¹⁴ Lampiran Data Intelijen Maritim, "Laporan Purna Tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L, 2019"

¹⁵ Ibid.

Terbentuknya Resolusi dan UNIFIL

Konflik antara Israel dan Hizbullah tahun 2006 berlangsung selama 34 hari. Pada 11 Agustus 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1701 yang menyerukan diakhirinya serangan antara Israel dan Hizbullah. Penjelasan dari resolusi tersebut adalah peran pemerintah Lebanon untuk memberikan jaminan keamanan di perbatasan dan memantau lebih dekat pos-pos di perlintasan perbatasan di seluruh wilayah Lebanon. Resolusi tersebut bertujuan untuk sepenuhnya mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hizbullah, dan 15.000 penjaga perdamaian akan menggantikan posisi Israel di Lebanon selatan.¹⁶ Resolusi PBB juga memerintahkan Israel untuk menghentikan semua operasi di wilayah Lebanon dan memerintahkan pasukan Hizbullah untuk mengakhiri serangan mereka. Resolusi itu juga menyerukan larangan transfer senjata legal dan memerintahkan pengerahan pasukan Lebanon ke Lebanon selatan untuk memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB.

Setelah perjanjian gencatan senjata, status quo diterapkan. Status Quo kembali ke keadaan semula. Dalam perjanjian gencatan senjata, pihak yang bertikai sepakat bahwa kawasan perbatasan harus dikembalikan ke keadaan semula, yaitu keadaan negara sebelum perang. Ini berarti, kedua pihak yang berperang harus menarik kembali pasukan masing-masing sesuai dengan peta perbatasan yang semula berlaku sah sebelum perang. Setelah adanya status quo, PBB menjalankan peacekeeping.¹⁷

Menurut PBB, Penjaga perdamaian atau peacekeeping adalah sebuah

instrument yang unik dan dinamis yang dikembangkan oleh organisasi sebagai cara untuk membantu negara-negara yang hancur oleh konflik, dan menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi serta memberikan kontribusi untuk memajukan proses perdamaian. Pasukan ini akan dikerahkan di wilayah yang memiliki status gencatan senjata dan telah diterima oleh kedua pihak yang berkonflik. Selama ini, ruang untuk mengatasi konflik dapat diciptakan melalui upaya diplomasi. Penjaga perdamaian memantau dan mengontrol proses perdamaian di daerah pasca-konflik dan membantu mantan gerilyawan dalam mengimplementasikan perjanjian perdamaian.

Operasi pemeliharaan perdamaian adalah operasi PBB di lapangan di mana personel internasional, warga sipil, dan pemerintah di bawah komando PBB diberikan otorisasi kelompok untuk bekerja sama dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik internasional aktual serta konflik internal yang muncul dan menikmati kebebasan internasional. Operasi penjagaan perdamaian secara sah dilakukan dengan adanya Dewan Keamanan PBB serta persetujuan dari pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat. Sejumlah negara yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikenal dengan sebutan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) mengirimkan wakil dari negaranya ke Lebanon.

Kehadiran pasukan PBB di Lebanon bukanlah hal baru. Karena sejak tahun 1978, ketika terjadi perang saudara di Lebanon, pasukan PBB telah dikirim untuk memadamkan konflik tersebut. Hingga 50 tentara Prancis sudah berada di markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon selatan. Negara Prancis tiba sebagai kelompok tentara pertama. Mereka termasuk di antara sekitar 200 personel yang dikerahkan untuk menjaga daerah itu. Pada saat yang sama, Jerman dan Belanda membantu mengamankan Laut Lebanon.

¹⁶ Farid Gaban, Surya Kusuma, and Alfian Hamzah, *Apa Dan Siapa Hizbullah & Nasrallah* (Jakarta: Misbah, 2006)

¹⁷ "Dinamika Konflik Lebanon", Repository.Umy.Ac.Id, <http://repository.uy.ac.id/>. Diakses 28 Desember 2022

Amerika tidak akan mengirim pasukan. Setelah menderita kerugian besar dalam perang sebelumnya di Beirut, Amerika membantu pasukan UNIFIL dengan logistik.

Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dibagi menjadi 7 tahap pelaksanaan, yaitu:¹⁸

1. Memonitor kesepakatan penghentian permusuhan di antara pihak-pihak yang bertikai

2. Mendampingi dan membantu pemerintah Lebanon selama proses penggelaran pasukan Lebanon (LAF) di Lebanon Selatan. Hal itu dilaksanakan bersamaan dengan proses pengunduran pasukan Israel (IDF). Pemerintah Lebanon dan Israel akan mengoordinasikan proses pengunduran pasukan di Lebanon Selatan.

3. Membantu pelaksanaan dan koordinasi dalam proses pengunduran pasukan Israel, baik dengan pemerintah Lebanon maupun Israel.

4. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil setempat serta, membantu mengamankan proses kembalinya masyarakat, baik yang telah mengungsi maupun yang telah terpisah dari keluarganya selama berlangsungnya perang sepanjang Juli sampai Agustus 2006.

5. Membantu pasukan LAF dalam proses mewujudkan zona wilayah bebas dari personel atau kelompok bersenjata beserta aset militer lainnya antara Blue Line dan Sungai Litani, kecuali aset militer dan senjata milik pemerintah Lebanon dan personel UNIFIL.

6. Menyakinkan bahwa wilayah tanggung jawab yang telah diberikan tidak digunakan untuk berbagai bentuk kegiatan yang dapat memicu terjadinya kembali konflik di antara pihak-pihak yang bertikai.

7. Membantu pemerintah Lebanon mengamankan garis batas antara Lebanon dan Israel serta sejumlah daerah yang dapat dijadikan titik infiltrasi.

Pemerintah Lebanon menerima draf tersebut dan Hizbullah mengadopsinya pada 12 Agustus 2006. Menanggapi resolusi Dewan Keamanan PBB, Israel mengadakan rapat kabinet darurat sehari kemudian. Pemerintah Israel akhirnya menerima dan meratifikasi gencatan senjata dengan 24 suara mendukung dan satu abstain. Dengan demikian, berakhirnya gencatan senjata secara resmi berlaku pada 14 Agustus 2006. Indonesia memberangkatkan pasukan KONGA XXVIII dan bergabung dengan UNIFIL untuk melakukan operasi perdamaian di Lebanon selatan.

Meskipun UNIFIL sudah ada sejak tahun 1978 untuk menjaga perdamaian namun, hingga saat ini konflik masih belum berakhir dan masih sering terjadi penyerangan dari Israel ke tanah kosong ke Lebanon dan serangan timbal balik dari Hizbullah yang tidak terima atas serangan tersebut walaupun tidak memakan korban jiwa. Hizbullah merupakan partai politik di Lebanon yang biasa disebut “partai kuning” yang dimana mereka memiliki alusista yang lebih lengkap dari pada pasukan UNIFIL.

Resolusi oleh DK PBB tidak dapat menghentikan secara penuh pertikaian dua pihak dan UNIFIL tetap diperlukan untuk menjaga dan mengawasi perdamaian di Timur Tengah serta membantu tentara Lebanon (LAF) untuk meningkatkan kemampuan mengamankan wilayahnya secara mandiri.

Kondisi Perekonomian Lebanon tahun 2019-2021

Sistem perekonomian Lebanon adalah liberal dan terbuka. Pada tahun 2019, Lebanon dilanda kekacauan politik akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, berdasarkan data bank

¹⁸ “Dinamika Konflik Lebanon”, op. cit. hal. 48

dunia pada akhir tahun 2019 menyebutkan lebih dari seperempat penduduk Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan dan merupakan negara paling tinggi tingkat hutangnya di dunia dengan defisit sekitar US\$86 miliar. Pemerintah Lebanon gagal melaksanakan kewajiban, pembayaran Eurobond yang jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2020 guna mengamankan kebutuhan dasar rakyat dan kebutuhan lainnya.¹⁹

Pandemi Covid-19 di Lebanon, memperburuk situasi dan memaksa Pemerintah memberlakukan *lock down*, dengan menutup Bandara Internasional Rafiq Hariri dan akses keluar masuk Lebanon melalui darat, laut dan udara, serta penetapan “*State Of Emergency*” yang diumumkan Pemerintah pada 15 Maret 2020 dalam upaya penekanan pandemic Covid-19. Pemerintah kembali membuka Bandara RHIA pada 1 Juli 2020 serta kebijakan lain dalam rangka menggerakkan perekonomian, guna memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian yang semakin terpuruk. Pada tanggal 04 Agustus 2020, terjadi insiden ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut yang telah memperburuk krisis ekonomi dan lonjakan kasus Covid-19. Dewan Pertahanan Tinggi Lebanon memutuskan untuk penerapan kembali *lock down*.²⁰

Ekonomi Lebanon di awal tahun 2021 semakin terpuruk, karena peningkatan kasus Covid-19 pasca liburan dan keputusan Dewan Menteri dengan pemberlakuan *lock down* hingga 08 Februari 2021 dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi dengan kasus mencapai 6.200 kasus/hari.

Mekanisme Pengiriman Pasukan Perdamaian

Pasukan perdamaian yang dikirimkan dalam UNIFIL (*United Nations Interim Force In Lebanon*) terbagi dalam

¹⁹ Lampiran Data Intelijen Maritim, op. cit. hal.3

²⁰ Lampiran Data Intelijen Maritim, op. cit. hal.4

beberapa sub tugas yaitu *Militer Observer*, *Militer Staf dan Contingent*. Untuk misi UNIFIL, Indonesia hanya mengirimkan Milstaf dan Contingent. Mekanisme pengiriman pasukan untuk *Milobs* dan *Milstaf* harus mendaftarkan diri serta menjalani tes untuk lulus mengikuti misi PBB. Sedangkan, *Contingent* sistemnya penunjukan dari komando atas. Dalam hal ini MTF berada dibawah *Contingent* atau Kontingen. Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian disebut dengan Kontingen Garuda. Pasukan yang akan berangkat diberikan PDT (Pre Deployment Training) selama satu bulan di PMPP TNI. Saat tiba di misi UNIFIL akan diberikan latihan bersama menggunakan alusista serta patroli di laut.²¹

Total pasukan perdamaian pada misi UNIFIL berjumlah 1.300 personel dan jumlahnya akan berbeda setiap tahunnya. Lama waktu pasukan perdamaian dikirimkan yaitu selama setahun sekali, berangkat dan kembali ke Indonesia memerlukan waktu 6 bulan berlayar dan untuk kapal perang hanya bertugas sekitar 6 bulan di misi UNIFIL. Dalam mengikuti misi ini, pasukan perdamaian di gaji oleh PBB serta mendapatkan penghargaan dan pengalaman kerja.²²

Tugas Pasukan Garuda Indonesia

Tugas UNIFIL/MTF. Berdasarkan UNSCR 1701, CTF 448 UNIFIL MTF memiliki tugas yang terbagi atas sebagai berikut:²³

a. Tugas Pokok. Melaksanakan Maritime Interdiction Operation (MIO) guna mencegah masuknya persenjataan dan material terkait lainnya secara ilegal

²¹ Wawancara Penulis bersama Bapak Letkol Arm H.Muhammad Taher, S.Pd.,M.Han melalui Daring selaku Intel Analyst Team Leader (MILSTAF) di UNHQ UNIFIL Naquora Lebanon

²² Ibid.

²³ Buku Panduan Satgas L , KONGA TNI XXVIII-L/MTF UNIFIL 2021.

menuju Lebanon melalui laut. Adapun tugas-tugas yang dilakukan antara lain:

1) Melaksanakan pengawasan maritim di wilayah AMO guna mendapatkan informasi awal terhadap kapal yang masuk dan mengidentifikasi seluruh kapal yang memasuki perairan teritorial Lebanon melalui penyelenggaraan Recognized Maritime Picture (RMP), termasuk dengan mengerahkan helikopter bila diperlukan.

2) Melaksanakan hailing terhadap kapal-kapal niaga yang melintas di AMO. Adapun laporan hailing akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan penilaian terhadap kapal yang bertujuan ke Lebanon, apakah memerlukan pemeriksaan oleh LAF-N atau tidak.

3) Melaksanakan boarding di perairan teritorial Lebanon hanya berdasarkan permintaan LAF-N yang telah disetujui oleh MTF-COM.

4) Melaksanakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan personel dan pengembangan prosedur operasional LAF-N sehingga secara bertahap mampu melaksanakan pengamanan maritim secara mandiri. Seluruh jadwal dan jenis aktivitas latihan akan dimuat dalam Weekly Training Schedule (WTS).

b. Tugas Tambahan.

1) Berkontribusi dalam penyediaan gambaran taktis udara (Recognized Air Picture) bagi UNIFIL baik di wilayah udara AMO maupun di MA.

2) Melaksanakan kegiatan Search and Rescue (SAR) sebagai aset maritim UNIFIL.

3) Melaksanakan pengamanan maritim apabila ditunjuk sebagai unsur pengamanan pada kegiatan Tripartite Meeting yang dilaksanakan dari AMO.

c. Tugas Terkandung. Melaksanakan latihan internal antar unsur MTF guna mempertahankan kesiapan dan kemampuan operasional minimum. Seluruh jadwal dan jenis aktivitas latihan akan dimuat dalam Weekly Training Schedule (WTS) dan MTF Exercise Catalogue.

Kondisi dan Kawasan yang Diawasi

Garis perbatasan laut yang diawasi ialah perbatasan laut Lebanon dan Israel tetapi adanya Line of Buoy (LoB) merupakan batas DAS yang ditentukan secara sepihak oleh Israel. Dalam ketentuan UNCLOS 1982, garis tersebut berada dalam wilayah Lebanon. LoB ditarik 290 derajat oleh Israel dari yang seharusnya 270 derajat dan dijadikan garis demarkasi. IDF melarang nelayan atau kapal dari Lebanon melintasi Line of Buoy.

Area of Maritime Operation (AMO). AMO adalah area operasi unsur MTF dalam melaksanakan tugas pokok sesuai mandat. AMO dibagi atas 4 zona yang terdiri dari:

1) Zone 1, merupakan perairan internasional dimana unsur memiliki mandat dari UN untuk melaksanakan hailing terhadap kapal-kapal yang akan Inbound, Outbound Lebanon maupun yang hanya melintasi (transit) di AMO. Zone 1 dibagi menjadi 3 bagian yaitu Zone 1 South, Zone 1 Center dan Zone 1 North.

2) Zone 2, merupakan zona khusus dan rawan dimana masih terdapat permasalahan perbatasan laut antara pihak Lebanon dengan Israel yang mengklaim secara unilateral ekstensi wilayah teritorialnya menggunakan LoB (Line of Buoy), dimana unsur MTF menganggap are tersebut sebagai zona abu-abu dimana unsur MTF harus menghindari sejauh 500 Yard dari zona tersebut, terkecuali atas perintah dan hal khusus (tripartite meeting)

3) Zone 3, merupakan perairan teritorial Lebanon bagian luar ($\pm 6 - 12$ Nm dari garis pantai) dimana unsur-unsur MTF masih dapat melaksanakan tugas utamanya Maritime Interdiction Operation, sebelum ditidakanjuti oleh LAF-N.

4) Zone 4: merupakan perairan teritorial Lebanon bagian dalam ($\pm 0 - 6$ Nm dari garis pantai) dimana unsur-unsur MTF sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai MIO, selanjutnya tugas tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh LAF-N.

5) Selain 4 zone tersebut, MTF mengalokasikan 1 area lagi di luar AMO yang dapat digunakan oleh unsur-unsur khusus untuk melaksanakan latihan Penembakan/GUNEX yaitu Area Barbara 3.²⁴

Ada 3 pelabuhan yang diawasi ialah pelabuhan Tyr, pelabuhan Beirut dan pelabuhan Tripoli. Tetapi, yang menjadi hotspot nya memperhatikan kapal yang keluar masuk ke Beirut karena merupakan ibukota dan kapal dagang lebih banyak masuk ke Beirut.

Blue Line (BL) adalah jalur penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Garis ini sepanjang 121 km dan bukan merupakan garis perbatasan antara dua negara. Blue Line merupakan batas, ada batas berupa tembok terbentang yang sekarang terbangun sepanjang 13 km dan juga ada berupa *blue barrel* atau seperti tong biru. Maka dapat ditelaah tugas dan kontribusi pasukan perdamaian Indonesia dalam menjaga perdamaian diantara wilayah Lebanon-Israel.

Kontribusi Pasukan Perdamaian

Berdasarkan permintaan dari Pemerintah Lebanon di bawah mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 (UNSCR 1701) maka dibentuklah *Maritime Task Force* pada tanggal 15 Oktober 2006 yang mendukung Angkatan Laut Lebanon dalam hal pengawasan laut teritorial, mengamankan garis pantai dan mencegah masuknya senjata maupun barang-barang yang dilarang melalui laut. Pada kenyataannya MTF tidak hanya berhasil menjalankan tugas utama mereka, tetapi juga berhasil memberikan kenyamanan dalam perdagangan dan ekonomi bagi Lebanon khususnya dari laut.²⁵

Pasukan perdamaian Indonesia pertama kali dikirim ke UNIFIL tahun 2006 hingga sekarang dan tahun 2009 Indonesia mulai mengirimkan pasukan

Angkatan Laut dalam Misi MTF. Adapun peran pasukan perdamaian Indonesia dalam MTF adalah menjaga batas laut antara laut yang dikuasai oleh Lebanon dan laut yang dikuasai oleh Israel. Maka, Indonesia mengirimkan satu unit Kapal Perang RI dalam misi UNIFIL. Kapal Perang RI dikirim secara bergantian dengan nama dan jenis yang berbeda setiap tahunnya.

Pada umumnya, Indonesia berkontribusi dalam mengirimkan pasukan perdamaian dunia ke semua Negara berkonflik yang terdiri dari Milobs, Milstaf dan Contingent. Dalam misi UNIFIL, Indonesia mengirimkan Milstaf dan Contingent. Salah satunya adalah MTF yang berada dibawah Contingent. Terdapat 5 negara yang berkontribusi pada misi MTF-UNIFIL, diantaranya ialah Indonesia, Jerman, Turki, Yunani dan Bangladesh.²⁶

Tujuan Indonesia sangat jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 maka pengiriman Pasukan Garuda merupakan salah satu teknik Diplomasi. Misi Indonesia yang dibawa oleh Pasukan Garuda ialah “We go there to create a peace not a war”. Maka selama misi ini pasukan tidak diperbolehkan untuk bertindak terhadap suatu masalah hanya untuk menjaga perdamaian dan melaporkan kegiatan dan permasalahan.²⁷

Satgas MTF TNI AL sudah dikirimkan selama 13 kali sejak tahun 2009 dimulai dari Konga XXVIII-A hingga XXVIII-M tahun 2020. Komandan Abdul Haris menggunakan KRI Sultan Iskandar Muda 367 dengan kru 120 orang serta membawa helikopter berangkat pada tahun 2020. Berbagai kejadian yang berdampak secara langsung dan tidak langsung, seperti pelaksanaan rotasi personel, Pandemi Covid-19 diikuti

²⁴ Buku Panduan Satgas L, op. cit.

²⁵ Buku Panduan Satgas L, op. cit.

²⁶ Wawancara Bersama Bapak Letkol Arm H. Muhammad Taher, S.Pd., M.Han selaku Intel Analyst Team Leader (MILSTAF) di UNHQ UNIFIL Naquora Lebanon

²⁷ Ibid.

dengan memburuknya situasi ekonomi Lebanon serta peristiwa ledakan Beirut. Kendala saat Pandemi Satgas melaksanakan *port visit* di Sri Lanka, Oman dan Jeddah tetapi, pasukan tidak boleh turun kecuali komandan dan perwira perbekalan.²⁸

Aktivitas Tugas Perdamaian oleh Pasukan Perdamaian Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Satgas MTF TNI. Selama melaksanakan On Task, yang hal-hal dilaksanakan Satgas MTF TNI dalam rangka sebagai implementasi, tugas-tugas unsur MTF antara lain adalah:²⁹

a) Sebagai unsur patroli di AMO:

1) Melaksanakan pengawasan maritim dan memonitor pergerakan kapal-kapal di seluruh wilayah AMO dalam rangka mendapatkan gambaran taktis permukaan (Recognized Maritime Picture/RMP) yang jelas bagi MTF.

2) Melaksanakan Hailing terhadap kapal-kapal yang berlalu lintas di AMO. Kapal yang berasal dari luar AMO dan bertujuan ke pelabuhan Lebanon harus dilaksanakan Full Hailing, kapal-kapal yang keluar dari Pelabuhan Lebanon serta kapal-kapal yang transit baik antar Pelabuhan Lebanon maupun di AMO harus dilaksanakan Short Hailing.

3) Melatih LAF-Navy. Menyelenggarakan latihan dengan LAF-Navy langsung menggunakan alusista beserta komponennya dalam rangka melatih dan meningkatkan profesionalisme personel LAF-Navy sehingga memiliki kemampuan mengamankan wilayah perairan territorial Lebanon.

4) Melaporkan hal-hal yang menonjol ataupun mencurigakan kepada MIOCDR (untuk kontak permukaan) dan AAWC (untuk kontak udara) untuk intensi lebih lanjut.

5) Melaksanakan pengawasan udara untuk berkontribusi dalam rangka mendapatkan gambaran taktis udara (Recognized Air Picture/RAP) bagi UNIFIL, baik aktivitas militer di wilayah udara AMO maupun territorial Lebanon

6) Selalu siaga sewaktu-waktu dikerahkan sebagai unsur SAR Maritim dari UNIFIL dan standby bila diperintahkan dalam tugas.

b) Sebagai HEC (Helicopter Element Coordinator):

(1) Menerima dan mengolah rencana penerbangan helikopter organik UNIFIL MTF setiap harinya

(2) Mengawasi dan mengatur penggunaan helikopter organik UNIFIL MTF

(3) Menentukan batas ketinggian aman (Flight Safety Altitude) dan pemisahan ketinggian dan jarak (Flight separation range/altitude) bagi helikopter organik UNIFIL MTF sesuai dengan SOP yang berlaku.

(4) Membuat MTF Flight Schedule setiap harinya.

(5) Selama operasi di AMO, KRI Sultan Hasanuddin-366 telah bertugas sebagai HEC dikarenakan satu-satunya unsur di MTF yang memiliki aset helikopter.³⁰

Kegiatan selama patroli aman terkendali dan satgas MTF wajib membuat laporan setiap hari berupa laporan kapal-kapal dagang yang keluar masuk Lebanon dan kapal-kapal perang asing yang masuk ke Lebanon. Dan juga melaporkan pesawat-pesawat tempur asing yang melewati Lebanon. Tugas pasukan hanya membuat laporan bukan untuk menindak suatu permasalahan.³¹

Aktivitas Lainnya oleh Kontingen Garuda selama Misi

Membangun akses dan hubungan kerjasama dengan Lebanon dan meningkatkan posisi Indonesia di PBB. Sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan citra

²⁸ Wawancara Bersama Bapak Letkol Laut (P) Abdul Haris sebagai Komandan Satgas MTF XXVIII-M Lebanon

²⁹ Buku Panduan Satgas L, op. cit. hal. 33

³⁰ Buku Panduan Satgas L, op. cit. hal. 38

³¹ Wawancara Bersama Bapak Kapten Agung sebagai Anggota Satgas MTF XXVIII-L Lebanon

internasional, bantuan Indonesia terhadap PBB dan Lebanon sebagai pasukan perdamaian setidaknya berkontribusi terhadap pandangan positif dunia terhadap Indonesia.

Satgas MTF TNI melaksanakan kunjungan di beberapa pelabuhan dunia untuk melakukan maintenance, penambahan peralatan dan penambahan logistic selama perjalanan lintas laut Indonesia-Lebanon. Operational calls secara teoritik dapat dimanfaatkan untuk mengesankan negara yang dituju melalui sikap dari awak kapal, kecanggihan teknologi yang terdapat dalam kapal perang dan hiburan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam negara target. Tugas pasukan tidak hanya menjaga perdamaian namun juga memperkenalkan budaya Indonesia pada masyarakat Lebanon.

Satgas MTF TNI melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat diplomatik, seperti menyelenggarakan courtesy call dan kegiatan seremonial lain. Courtesy Call ialah kunjungan yang dilakukan oleh pejabat suatu instansi ke instansi lain untuk perkenalan ataupun kerjasama guna mempererat hubungan. Seperti yang dilakukan pasukan perdamaian Indonesia ke LAF-Navy dan Bangladesh.

Respon Masyarakat Lebanon Terhadap Pasukan Garuda Indonesia

Indonesia adalah satu satunya Negara di dunia yang dalam Undang-Undang Dasarnya menyebutkan secara tertulis tentang “ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Negara Indonesia yang tidak pernah menjajah Negara lain sehingga tidak memiliki musuh. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap penugasan Pasukan Garuda di dunia yang dapat diterima dengan baik serta dipercaya oleh masyarakat dunia.

Respon masyarakat Lebanon sangat positif terhadap Pasukan Garuda yang dimana Indonesia menganut Negara non blok dan muslim terbesar di dunia. Tugas Pasukan Indonesia yang murni

untuk perdamaian maka masyarakat Lebanon sangat menyambut baik Pasukan Garuda bisa dinilai sebagai pasukan yang sangat dekat dan di cintai oleh rakyat Lebanon melebihi semua pasukan yang bertugas disana.

Masyarakat Lebanon yang sudah seperti keluarga dengan pasukan Indonesia, saat misi sudah hampir selesai untuk pulang dan berpisah mereka sangat merasa berat untuk ditinggalkan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa pasukan perdamaian Indonesia sangat diterima.³²

Permasalahan yang terjadi saat Misi

1) Maraknya pelanggaran Israel atas kedaulatan Lebanon tercatat pada tahun 2019, sebanyak 2.551 pelanggaran darat, laut dan udara, sedangkan data pelanggaran tahun 2020 terangkum hingga juni 2020 sebanyak 274 pelanggaran darat, 386 laut dan 250 udara berdasarkan pernyataan resmi Perdana Menteri Lebanon.

2) Insiden Ledakan di Pelabuhan Beirut. Ledakan di pelabuhan Beirut pada 04 Agustus 2020, yang disebabkan 2.750 Ton ammonium nitrat, telah menimbulkan korban meninggal 200 orang, lebih dari 6.000 orang terluka, 3.500 orang kehilangan tempat tinggal, beberapa orang tidak ditemukan dan hancurnya fasilitas pelabuhan telah memperburuk perekonomian dan lonjakan kasus Covid-19.

3) Pembaruan Mandat UNIFIL. Keputusan DK PBB (UNSC) Resolusi 2539 tanggal 28 Agustus 2020 tentang perpanjangan mandate UNIFIL selama satu tahun hingga 31 Agustus 2021, mengurangi jumlah pasukan dari 15.000 menjadi 13.000 dan menyerukan pemerintah Lebanon untuk memfasilitasi akses cepat dan penuh ke situs-situs yang diminta UNIFIL guna penyelidikan termasuk terowongan yang

³² Wawancara Bersama Bapak Kapten Agung sebagai Anggota Satgas MTF XXVIII-L Lebanon

melintasi Garis Biru antara Lebanon dan Israel.

4) Permasalahan Pengungsi. Insiden di El Miniyeh Lebanon Utara pada 26 Desember 2020, perselisihan antara warga Lebanon dengan pengungsi Suriah yang menimbulkan pembakaran puluhan Camp pengungsi Suriah oleh warga lokal dan pengusiran pengungsi Suriah dari Lebanon.

5) Perundingan Maritim. Quadripartite Meeting antara Lebanon dan Israel yang dimediasi AS bersama PBB, di Markas UNIFIL Naqura Lebanon Selatan, telah dilaksanakan empat kali pertemuan selama tahun 2020, yang membahas demarkasi laut sengketa seluas 856 km², namun Lebanon meminta tambahan 1.430 km² (tidak hanya wilayah sengketa seluas 856 km²), untuk dimasukkan ke dalam wilayah Lebanon, seperti yang diakui dalam perjanjian Lebanon-Israel tahun 1949, dengan mengadopsi batas laut tahun 1923 yang merupakan mandat Inggris atas Palestina dan mandat Perancis atas Lebanon sebagai garis demarkasi dan ditolak Israel.

Hasil dari Misi

Suatu kebanggaan TNI untuk bisa bertugas dengan AL terbaik dari berbagai belahan dunia yang tergabung dalam CTF 448. Kerja sama yang baik, integritas, dan berbagai latihan merupakan momen yang berharga guna tingkatan profesionalisme prajurit. Diatas segalanya, Operasi ini membentuk suatu ikatan dan persaudaraan yang baik antar Angkatan Laut negara sebagai bagian dari tupoksi TNI AL dalam pelaksanaan tugas diplomasi Angkatan Laut.³³

Sultan Iskandar Muda-367 ditunjuk sebagai unsur MTF yang bertanggung jawab untuk keamanan wilayah Maritim selama pelaksanaan 1 Tripartite Meeting & 1 Quadripartite Meeting. KRI SIM-367 juga dipercaya menjadi observer dalam pelatihan “MULTILATERAL

ARGONOUT EXERCISE tahun 2022” di Cyprus. KRI SIM ditunjuk sebagai host bagi para pejabat tinggi UNIFIL dalam melaksanakan pertemuan/diskusi operasi.³⁴

Mendapatkan apresiasi dari UNIFIL MTF Commander berupa Medal Parade Ceremony kedua setelah melaksanakan perpanjangan misi sampai bulan Agustus 2022.

Terlihat dari pencapaian misi oleh Kontingen Garuda bahwa pasukan perdamaian Indonesia sangat berkontribusi dan diandalkan dalam misi MTF UNIFIL. Hal ini menunjukkan TNI sudah dapat bertugas dengan baik dengan hasil yang “MEMUASKAN” pada misi. Dan menjalani tugas sesuai mandat PBB ialah membantu meningkatkan kemampuan LAF-Navy untuk dapat mengamankan wilayah perairan teritorial Lebanon ke depannya secara mandiri.

Analisa Misi Perdamaian Indonesia di MTF-UNIFIL

Konflik perebutan wilayah antara Lebanon-Israel hingga saat ini belum ada penyelesaian dikarenakan perbenturan kepentingan serta pihak Israel dan Hizbullah masih menunjukkan kekuatan menggunakan alusista dan adanya ketakutan oleh masyarakat atau menyengsarakan manusia, yang dimana keduanya berpotensi perang dan situasi tersebut belum dapat dikatakan situasi damai. Maka, *positive peace* menurut Johan Galtung yang ditandai dengan keberadaan suatu perangkat penyelesaian konflik yang bersifat non-koersif untuk mencegah timbulnya konflik. Misi pemeliharaan perdamaian yang dibentuk PBB sebagai perangkat yang dapat mencegah terjadinya konflik. Komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia yaitu ikut serta dalam misi perdamaian.

Pada misi MTF-UNIFIL, Indonesia berkontribusi dalam mengirimkan pasukan perdamaianya serta Kapal Perang RI

³³ PPT Laporan Purna Tugas MTF 28-M

³⁴ Ibid.

untuk menjaga dan mengawasi perairan teritorial Lebanon serta melatih tentara Lebanon untuk membantu meningkatkan kemampuan tentaranya. Latihan bersama oleh pasukan MTF dan LAF-Navy yang dilakukan langsung menggunakan alusista. Pasukan Garuda berhasil untuk memenuhi setiap tugasnya pada misi ini serta melakukannya tetap dibawah mandat PBB.

Kontribusi Indonesia dalam mengirimkan pasukan Garuda pada misi MTF-UNIFIL ini merupakan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Dapat terlihat dari Indonesia yang setiap tahunnya tetap mengirimkan pasukannya dengan Kapal Perang RI demi menjaga komitmennya terhadap ketertiban dunia dalam UUD 1945 alinea ke-4.

KESIMPULAN

Permasalahan yang terjadi antara Lebanon dan Israel menjadi konflik yang tidak berujung sehingga Perdana Menteri Lebanon mengirimkan surat permohonan bantuan kepada DK PBB untuk menghentikan konflik . Pada tanggal 14 Juli 2006, Lebanon dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata dibawah United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1701. Maka perlu adanya penengah untuk menjaga perdamaian berada di bawah mandat PBB untuk menjaga perdamaian.

PBB membuat operasi UNIFIL untuk menjaga perdamaian di Lebanon dan untuk area maritime ialah Maritime Task Force (MTF). Kontribusi Indonesia dalam misi ini merupakan pengiriman pasukan garuda ke Lebanon untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Pasukan garuda selalu berhasil menjalankan misi UNIFIL MTF dan mendapatkan penilaian outstanding serta penghargaan.

Belum ada tanda-tanda misi ini akan berakhir karena konflik yang masih belum ada kesepakatan antara Lebanon dan Israel terkait wilayah yang dipermasalahkan. Meskipun telah diadakan Quadripartite Meeting selama 4 kali pada

tahun 2020 antara Lebanon dan Israel yang dimediasi AS bersama PBB.

Untuk misi Lebanon terdapat mandat di chapter VI, “tidak boleh menggunakan kekuatan”. Maka tugas pasukan perdamaian hanya mengawasi dan menjaga perdamaian tidak diperbolehkan untuk menindak suatu permasalahan saat misi berlangsung.

Peran pasukan perdamaian Indonesia dalam MTF ialah menjaga batas laut antara laut yang dikuasai oleh Lebanon dan laut yang dikuasai oleh Israel. Dengan demikian Indonesia mengirimkan satu unit Kapal Perang serta helikopter pada misi ini. Kapal Perang ini bergantian nama dan jenis yang dikirim dari Indonesia ke UNIFIL setiap tahunnya.

Fleksibilitas dalam Satgas MTF TNI memiliki makna bahwa kapal perang Indonesia yang dikirim dapat melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan perdamaian di laut Lebanon namun juga memperlihatkan kekuatan militer Indonesia, khususnya Angkatan Laut.

Banyak pencapaian misi oleh pasukan diantaranya ialah KRI Sultan Iskandar Muda ditunjuk sebagai host bagi para pejabat tinggi UNIFIL dalam melaksanakan pertemuan atau diskusi operasi. Indonesia meraih penghargaan atas dukungannya dalam Penguatan Hubungan Bilateral antara Indonesia, Turki dan Lebanon.

Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen ini senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam MPP PBB.

Indonesia selalu berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaian menunjukkan bahwa eksistensi Indonesia dalam misi perdamaian sangat baik dengan pencapaian misi yang selalu berhasil dengan nilai “MEMUASKAN”. Dan juga

respon masyarakat Lebanon terhadap pasukan perdamaian Indonesia selalu disambut dan diperlakukan dengan sangat baik. Hal ini menjadikan salah satu indikator keberhasilan pasukan dalam misi.

Kontribusi Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian menjadikan terbukanya jalan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Lebanon. Terjalannya hubungan yang baik menjadikan manfaat bagi kepentingan Indonesia pada bidang politik atau hubungan internasional, ekonomi atau perdagangan, sosial-budaya maupun pertahanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Satgas L, Konga XXVIII-L/MTF UNIFIL, 2021.

Gaban, Farid, Surya Kusuma, and Alfian Hamzah. *Apa Dan Siapa Hizbullah & Nasrallah*. Jakarta: Misbah, 2006.

Johan Galtung, *Peace By Peaceful Means*. London: SAGE Publications, 1996.

Lampiran Data Intelijen Maritim, "Laporan Purna Tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L

Michael Hass dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, 1969.

PUSPEN TNI, Puspen Mabes TNI. "MARITIME TASK FORCES Â€“ UNIFIL | WEBSITE TENTARA NASIONAL INDONESIA". Tni.Mil.Id, 2022. <https://tni.mil.id/view-45242-maritime-task-forces-unifil.html>.

R. Viotti, Paul dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and*

Beyond. London: Allyn dan Bacon, 1999.

Tabloid Diplomasi, "Diplomasi Indonesia Konsisten Mengelola Perubahan", 2012, <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2012/Tabloid%20Diplomasi%20Januari%202012.pdf> United Nations Security Council, "Functions and Power." <http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml>

United Nations, "Charter of the United Nations: Chapter VII," <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>

"Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 | PPID Kementerian Pertahanan Republik Indonesia". Kemhan.Go.Id, 2014. <https://www.kemhan.go.id/ppid/2014/01/20/buku-putih-pertahanan-indonesia-2008/>.

"DINAMIKA KONFLIK LEBANON". Repository.Umy.Ac.Id. Accessed 4 September 2022. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21451/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.